

KUALIFIKASI STANDAR PENDIDIKAN DALAM PERMENDIKNAS NO 58 TAHUN 2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
RAMLI
NIM. E21110034

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: flash09.ram@gmail.com.

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Kualifikasi Standar Pendidikan Dalam Permendiknas No 58 Tahun 2009 dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang kurang maksimal, seperti kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini (paud). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Efektifnya Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Di PKBM "Marga Jaya" Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang menyangkut dengan 4 standar PAUD. Teori yang digunakan yaitu teori George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yang terdiri dari Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resource*), Disposisi Atau Sikap (*Disposition Or Attitudes*), Struktur Organisasi (*Bureaucratic Strukture*). Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dalam implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 belum berjalan dengan efektif, kemampuan Sumber Daya yang diperlukan belum tersedia dengan maksimal dan masih terdapat kekurangan, sikap implementor dalam hal implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 sudah dikatakan cukup baik dan Struktur Organisasi dalam implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 harus ada kejelasan dalam pembagian tugas. Hal ini terjadi dikarenakan implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 masih rendah tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya PAUD umur 0-<6 tahun sebagai pendidikan awal sebelum lanjut ke pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan jumlah anak usia 0-<6 tahun sebanyak 1.889 anak dengan jumlah peserta PAUD sebanyak 305 anak jadi terdapat 1.584 anak yang tidak mengikuti PAUD. Saran dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Dan PKBM "Marga Jaya" Kecamatan Rasau Jaya terhadap masyarakat perlu dibenahi dengan meningkatkan kerjasama diantara instansi terkait dan unsur pimpinan kepada bawahan maupun unsur bawahan kepada atasan agar kebijakan yang sudah digerakkan dapat berjalan dengan efektif.

Kata-kata Kunci: Kualifikasi Standar Pendidikan, Permendiknas No 58 Tahun 2009, Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Kecamatan Rasau Jaya

EDUCATION STANDARDS QUALIFICATION IN PERMENDIKNAS NO 58 OF 2009 TO INCREASE EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECD) IN RASAU JAYA OF KUBU RAYA DISTRICT

Abstract

The problem in this research is the Qualifying Education Standards In Permendiknas No 58 of 2009 on Improving Early Childhood Education (ECD) In District Rasau Jaya - Kubu Raya which is less than the maximum, as the lack of awareness of parents of the importance of early childhood education (ECD). This study aimed to analyze the Factors Affecting Less Effective the Implementation of National Education Minister Regulation No. 58 Year 2009 on Early Childhood Education Standards In PKBM "Marga Jaya" Rasau Jaya subdistrict of Kubu Raya District relating to the four standard early childhood. The theory used is the theory of

George C. Edwards III (in Agustino, 2006: 150), which consists of Communication, Resource (Resource), disposition or attitude (Disposition Or Attitudes), Organizational Structure (Bureaucratic Structure). While this method uses qualitative descriptive study.

The results showed that the Communication in policy implementation Ministerial Regulation No. 58 Year 2009 is not operating effectively, the ability Resources required is not available maximally and there is still a shortage, attitudes implementor in terms of policy implementation Ministerial Regulation No. 58 Year 2009 is already said to be quite good and Organizational Structure in policy implementation Permendiknas No 58 of 2009 there should be a clear role in the division of tasks. This occurs because of policy implementation Permendiknas No 58 of 2009 is still low level of participation of the importance of early childhood age 0-<6 years as early education before going to primary school education. Based on the number of children aged 0-<6 year as many as 1,889 children with early childhood number of participants as much as 305 children, so there are 1,584 children who do not follow ECD. Suggestions in this study is the communication that will be done by the Department of Education of Kubu Raya and PKBM "Marga Jaya" SubDistrict of Rasau Jaya to society need to be addressed to enhance the cooperation between relevant institutions and leaders to subordinates as well as elements of subordinates to superiors that the policy has been driven to be effective.

Keywords: Qualification Standard Education, Ministerial Regulation No. 58 Year 2009, Early Childhood Education (early childhood), District Rasau Jaya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki secara utuh, yaitu ditandai dengan karakter, budi pekerti luhur dan terampil. secara naluri, keluarga (terutama orang tua) merupakan pendidikan yang pertama dan utama ketika anak dilahirkan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui peraturan pemerintah pusat maupun peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Nasional,

diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Mutu Pendidikan. Sedangkan untuk saat ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pendidikan formal dan nonformal.

Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari integral dari standar nasional pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan pertimbangan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok yaitu:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan
- b. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- c. Standar Isi, Proses, Dan Penilaian, Dan
- d. Standar Sarana Dan Prasarana, Pengelolaan Dan Pembiayaan

PKBM “Marga Jaya” merupakan suatu organisasi atau yayasan yang mendirikan beberapa lembaga pendidikan masyarakat untuk memudahkan didalam memperoleh pendidikan. Pada PKBM “Marga Jaya” terdapat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bentuk pendidikan dasar yang diperoleh anak umur 0 sampai 6 tahun, adapun nama-nama PAUD yang dibawah oleh PKBM tersebut yaitu PAUD Al-Irsyad Dan PAUD Tunas Tanjung. Berdasarkan Proses Implementasi PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Standar PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya.

Permasalahan indikator komunikasi pada teori ini melihat pandangan para pelaksana didalam memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya pada tatanan hidup bermasyarakat, apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum sehingga pemerintah harus terus mengawasi dan

mengontrol agen pelaksana, karena kebijakan tersebut berasal dari pemerintah. Berdasarkan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 yang menjelaskan 4 standar PAUD diantaranya Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD, tingkat perkembangan anak usia dini terjadi dalam waktu rentang pertahun yaitu: 0-<2 tahun, 2-<4 tahun dan 4-<6 tahun. Pengelompokan usia 1-<1 tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Pengelompokan usia 1-<2 tahun dilakukan dengan rentang 6 bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentang waktu per tahun.

Standar tingkat Pencapaian PAUD pada proses komunikasi agen pelaksana tidak secara maksimal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang Program PAUD tersebut, karena besarnya anak usia dini rentang waktu umur 0-<6 tahun di Kecamatan Rasau Jaya sebanyak 1.889 orang sangat diperlukan oleh orang tua untuk meningkatkan perkembangan anak. Dengan demikian pencapaian perkembangan yang digambarkan melalui aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial-emosional. Setelah anak memperoleh

pendidikan usia dini maka akan memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini belum berjalan efektif karena hanya orang tua yang memasukkan anaknya ke PAUD yang akan memperoleh pendidikan PAUD sehingga tumbuh dan kembangnya akan diperhatikan untuk dapat meningkatkan pendidikannya. Oleh sebab itu, orang tua yang tidak memasukkan anaknya di PAUD tidak akan mendapatkan pendidikan anak usia dini, dimana kurangnya partisipasi orang tua yang memiliki anak usia dini untuk mengikuti PAUD. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat disebabkan proses komunikasi yang tidak berjalan efektif.

Hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan adanya sosialisasi mengenai program PAUD ini, melainkan mereka mengetahuinya dari orang-orang maka mereka mengetahui jika ada program PAUD ini. Sehingga informasi yang diberikan tidak diketahui oleh semua masyarakat, tentunya ada masyarakat yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui dengan demikian standar

PAUD yang diwajibkan pemerintah kurang berjalan dengan maksimal.

Selain itu, berdasarkan indikator sumber daya menjelaskan bahwa staf merupakan aspek terpenting untuk menggerakkan kebijakan organisasi supaya dapat berjalan maksimal. Pada PKBM “Marga Jaya”, tenaga pendidik menjadi faktor penting untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini, melalui Standar Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan PAUD sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bertugas untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, layanan PAUD harus dikelola dengan baik.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan kebawahan, perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas isi informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*Missed Communication*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*Street-Level-Bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan tidak ambigu/mendua. Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan *Fleksibilitas* dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk ditetapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Subarsono (2005:90) yang mengatakan bahwa kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun kompeten dibidangnya.

2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang, pada umumnya kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

c. Disposisi Atau Sikap (*Disposition Or Attitudes*)

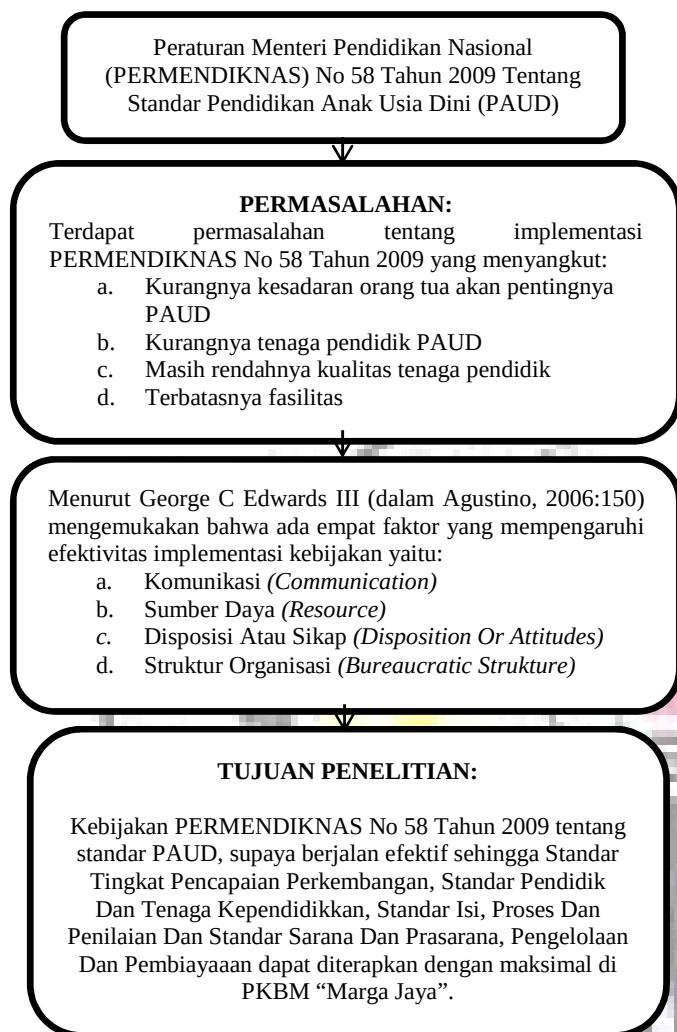
Menurut Subarsono (2006:91), mengatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kemudian, dalam hal ini yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung pada sejauh mana wewenang yang ada padanya.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Tructure*)

Menurut Subarsono (2006:92), mengatakan bahwa struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP).

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi dipangan

pada saat penelitian dilaksanakan. Yang menjadi fokus penelitian serta menarik untuk diteliti yaitu: Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Di PKBM "Marga Jaya" Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini antara lain adalah:

- Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
- Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
- Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya".
- Tenaga Pendidik.
- Orang Tua Anak PAUD.

Obyek Penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di PKBM "Marga Jaya" Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, diharapkan dapat membentuk karakter anak-anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) supaya dapat bertumbuh dan berkembang baik sesuai dengan standar. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik Wawancara, Teknik Observasi Dan Teknik Dokumentasi. teknik analisis data

yaitu menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan Dan Verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemahaman dari Program PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya terdapat permasalahan yang dilihat dari proses implementasi, karena kesuksesan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sosialisasi kebijakan kepada mereka baik yang melaksanakan kebijakan maupun yang akan menjadi target kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan. Adapun permasalahan yang terdapat dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, masih kurangnya tenaga pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih rendahnya keterampilan dan kemampuan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar, terbatasnya fasilitas yang dimiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan Pelaksanaan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan masalah diatas penulis menggunakan indikator-indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setia kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Orang Tua Murid PAUD (Saiful Amali Dan Tanty Y) yang mengatakan bahwa:

“kalo sosialisasi memang ade kalo dag salah, karene kemaren tu saye dag ikut. Kan dag semua kemaren tau kalo ade sosialisasi PAUD ni... karene pun saye masukkan anak saye ke PAUD ni taunye dari tetangga, lagi pula anak tu susah belajar dirumah makenye saye masukkan ke PAUD ni geto...”

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, proses komunikasi yang terjadi dari atas kebawah tidak berjalan dengan maksimal hanya terjadi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Dan PKBM “Marga Jaya” selaku pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyebutkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan adanya sosialisasi mengenai program PAUD ini, melainkan mereka mengetahuinya dari orang ke orang maka mereka mengetahui jika ada program PAUD ini. Sehingga informasi yang diberikan tidak diketahui oleh semua masyarakat, tentunya ada masyarakat yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui dengan demikian standar PAUD yang diwajibkan pemerintah kurang berjalan dengan maksimal.

b. Kejelasan Komunikasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan selalu menghalangi

implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan Kebijakan Program PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada Orang Tua Murid PAUD (Saiful Amali Dan Tanty Y) mengatakan bahwa:

“gimane mau jelas pak, sedangkan pada waktu sosialisasi jak saye dag ade. Yang saye tau PAUD ni kayak sekolah khusus anak usia dini, kayak saye ni kan punya anak umur 4 tahun kalo masuk SD masih dag cukup umurnye, makanye supaye anak saye tu bise baca tulis saye masukkan lah ke PAUD ni sebelum didaftarkan ke SD”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, masih adanya ketidakjelasan informasi yang diterima oleh orang tua murid tentang Implementasi Kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD, mereka hanya mengetahui jika PAUD ini merupakan sekolah khusus untuk anak usia dini supaya dapat memperoleh pengajaran membaca

dan menulis. Sedangkan tujuan dan manfaat kebijakan ini belum terkomunikasikan dengan baik karena penerima informasi yang diketahui masyarakat tidak merata semua mengetahuinya.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga pendidik PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya sebanyak 6 orang yang terdiri dari PAUD Al-Irsyad sebanyak 4 orang dan PAUD Tunas Tanjung sebanyak 2 orang. Selain itu, jumlah jenjang pendidikan tenaga pendidik PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya yang terdiri dari SMA sebanyak 4 orang, Diploma sebanyak 1 orang dan S1 sebanyak 1 orang. Kemudian, jumlah peserta didik PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya sebanyak 73 orang yang terdiri dari: PAUD Al-Irsyad sebanyak 46 orang dan PAUD Tunas Tanjung sebanyak 27 orang.

Hasil wawancara dilakukan kepada Kepala PKBM “Marga Jaya” (Ahmad Arsyad) yang mengatakan bahwa:

“untuk masalah tenaga pendidik masih kurang, perlu ada penambahan agik. Memang perlu adanya pelatihan bagi setiap tenaga didik supaya dapat trampil dan memiliki skill yang baik, Cuma kan kembali lagi kepada pemerintah apakah bisa melaksanakan kegiatan pelatihan itu. Tenaga pengajar kami ini kadang

mahasiswa yang bantu, kadang masyarakat setempat, mereka itu kadang betah lama-lama ngajar PAUD mungkin karena honor nya terbatas kali ya... yang penting kita berusaha supaya kebijakan ini berjalan”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga pendidik PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya jumlahnya perlu ada penambahan. Tenaga pendidik yang ada saat ini jumlahnya terbatas, selain menambah jumlah penerimaan tenaga pendidik juga perlu adanya seleksi yang baik supaya memperoleh tenaga pengajar berkompeten dan berkualitas sehingga mempunyai kemampuan memberikan pengetahuan kepada muridnya.

Namun, PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya tenaganya kebanyakan tidak tahan lama-lama mengajar karena honor yang diterima terbatas, kadang ada, kadang pun tidak ada. Maka dari itu tenaga pendidik pun kadang-kadang dibantu oleh mahasiswa dan masyarakat setempat yang dengan sukarela membantu proses belajar mengajar di PAUD PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya, meskipun demikian posisi mereka tidak bertahan lama untuk mengajar, apabila ada tawaran mengajar yang lebih penghasilannya menyebabkan mereka meninggalkan PAUD tersebut. Hal inilah kesulitan bagi Pelaksanaan

PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 dalam mempertahankan tenaga pendidik supaya betah memberikan pengajaran kepada anak usia dini.

b. Fasilitas

PKBM “Marga Jaya” memiliki bangunan pada tiap-tiap PAUD sebagai fasilitas pendukung dalam proses belajar mengajar, adapun rincian bangunan tersebut terdiri dari Ruang Tamu pada PAUD Al-Irsyad sebanyak 1 unit dan PAUD Tunas Tanjung sebanyak 0 unit, Ruang Belajar pada PAUD Al-Irsyad sebanyak 2 unit dan PAUD Tunas Tanjung sebanyak 1 unit, Ruang Dapur pada PAUD Al-Irsyad sebanyak 1 unit dan PAUD Tunas Tanjung sebanyak 0 unit, dan Ruang MCK pada PAUD Al-Irsyad sebanyak 2 unit dan PAUD Tunas Tanjung sebanyak 0 unit. Untuk lebih memperjelas keadaan bangunan yang dimiliki oleh PKBM “Marga Jaya” penulis telah melakukan wawancara mengenai fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (Wagiah, A. Ma) yang mengatakan bahwa:

“kalau bicara fasilitas ya... boleh dikatakan sudah lengkaplah. Disini termasuk ruangan, meja, kursi dan buku sudah kita katakan fasilitasnya lengkap. Ya kita inginkan maunya ditambah

semakin banyak kan semakin maksimal kita kerjanye. Seperti komputer, meja, kursi dan buku. Cuma saat ini kami kekurangan meja, kursi dan buku. Pandai-pandailah kamu untuk menempatkan tempat yang sederhana itu sekian”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan Program PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD adalah ketersediaan fasilitas yang lengkap guna menunjang pelaksanaan program PAUD tersebut. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara fasilitas yang dimiliki PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya sangat terbatas, meja dan kursi tidak mampu mencukupi jumlah murid yang ada, sehingga pada saat proses belajar mengajar ada beberapa anak yang duduk dilantai sambil mengikuti dan mendengarkan gurunya menjelaskan kedepan. Hal ini tentu saja menghambat program PAUD untuk mencapai standar ditambah lagi jumlah buku yang tersedia sangat terbatas, apabila guru ingin memberikan bahan ajaran lewat buku harus secara bergantian maka dari itu kurikulum yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan sangat sulit untuk tercapai secara cepat disebabkan oleh keterbatasan fasilitas.

3. Sikap Atau Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, tindakan pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga dari sikap pelaksana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (Firmansyah, S. Pd) yang mengatakan bahwa:

“kami selaku pelaksana dalam hal ini berharap dengan berjalannya kebijakan ini kedepannya tingkat pendidikan anak khususnya di kabupaten kubu raya dapat meningkat sehingga kebutuhan akan standar PAUD dapat tercapai sesuai tujuan PERMENDIKNAS”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap SKPD seperti: Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Kepala PKBM “Marga Jaya”

sangat mendukung program standar PAUD ini, mereka berharap kebijakan ini dapat berjalan maksimal sebagaimana mestinya supaya tingkat pendidikan masyarakat termasuk anak usia dini dapat meningkat kedepannya. Seperti yang diketahui Kabupaten Kubu Raya merupakan pemekaran dari wilayah Kota Pontianak jadi masih tergolong baru, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dalam bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

Perkembangan suatu wilayah harus didorong oleh meningkatnya tingkat pendidikan, maka dari itu dalam rangka mencapai standar pendidikan pemerintah mencanangkan anak usia 0-6 tahun diharapkan mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya. Jadi untuk kedepannya tidak ada lagi anak usia dini yang tidak bersekolah melainkan setiap anak harus memperoleh pendidikan setinggi-tingginya supaya mengurangi tingkat kemiskinan akibat rendahnya pendidikan dan putus sekolah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya yang melaksanakan kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek

struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya antara pemerintah dan PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya dalam pembagian tugas harus sesuai dengan prosedur.

Pembagian tugas diberikan kewenangan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang suatu kebijakan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevan sesuai fakta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tenaga pendidik (Sumiarti) yang menyatakan bahwa:

“kalo dilihat dari pembagian tugas sih kayaknye udah berjalan baik lah ye, soalnya kan disini ada guru, ade kepala pengelolanya juga trus penanggungjawabnya. Jadi kan mereka sudah tau apa pekerjaan mereka, itu aja sih yang saye liat, untuk pembagian tugas mengajar ini yang kadang-kadang kita harus membagi waktu karenakan tenaga pendidik disini kurang jadi setiap pelajaran kita harus pandai-pandai

membagi jadwal supaya tidak tabrakan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dilihat dari pembagian tugas PKBM “Marga Jaya” terdapat susunan organisasi yang sudah jelas tugas dan fungsinya masing-masing. Pada PAUD Al-Irsyad dan PAUD Tunas Tanjung terdapat guru dan kepala pengelolanya, namun pada bagian tenaga pendidik, oleh karena keterbatasan jumlah maka setiap pekerjaan harus diatur dengan baik karena terkadang dengan jumlah pelajaran yang diberikan ditambah lagi jumlah tenaga pendidik terbatas sehingga pekerjaan menjadi rangkap.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, khususnya pada Bab IV sebagai Bab Pembahasan, maka pada Bab ini sebagai Bab Penutup dikemukakan beberapa kesimpulan, dalam hal Mengimplementasikan Kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 belum berjalan dengan efektif, hal ini

terlihat dari sebagian masyarakat tidak memahami informasi yang diterima dan sosialisasi yang dilakukan tidak merata karena hanya dilakukan kepada masyarakat tertentu.

2. Kemampuan Sumber Daya yang diperlukan belum tersedia maksimal dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, adapun upaya yang dilakukan guna meningkatkan standar Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang profesional dan berkemampuan serta berketrampilan sebagai guru pengajar. Kemudian secara umum fasilitas sudah tersedia, akan tetapi jumlahnya perlu ada penambahan.
3. Sikap implemendor dalam hal implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 sudah dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari sikap tenaga pendidik yang secara sukarela membantu mengajar dengan honor terbatas. dinas pendidikan selalu memperhatikan kurikulum dan kompetensi bagi PAUD supaya mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas
4. Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 kurang berjalan maksimal karena terdapat pekerjaan rangkap pada bagian tenaga pendiknya, hal ini dikarenakan jumlah tenaga pendidik

yang terbatas dan jumlah pelajaran yang tidak seimbang sehingga menjadi rangkap pekerjaan.

F. SARAN

Mengatasi masalah yang timbul sebagaimana telah digambarkan pada kesimpulan diatas, dalam upaya mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna maka perlu adanya langkah-langkah perbaikan. Adapun beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Dan PKBM "Marga Jaya" Kecamatan Rasau Jaya terhadap masyarakat perlu dibenahi dengan meningkatkan kerjasama diantara instansi terkait dan unsur pimpinan kepada bawahan maupun unsur bawahan kepada atasan agar kebijakan yang sudah digerakkan dapat berjalan dengan efektif.
2. Sumber daya yang tersedia perlu dilakukannya penambahan tenaga pendidik dan penambahan saran dan prasarana untuk menunjang semua kegiatan PAUD, selain itu juga anggaran untuk meningkatkan kebutuhan kelengkapan PAUD, kedepannya perlu lagi ditingkatkan lagi

jumlahnya sehingga tidak perlu lagi kekurangan sarana dan prasarana.

3. Perlu adanya semangat kerjasama yang besar. Semangat kerjasama merupakan bagian terpenting agar kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 dapat berjalan maksimal, dengan semangat kerjasama yang tinggi, maka setiap tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tidak mementingkan kepentingan sendiri, melainkan kerjasama yang besar diharapkan beban pekerjaan terutama proses pengajaran yang menjadi ringan.
4. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas, tepat dan tegas terhadap implementasi PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009, dengan memberikan instruksi yang dapat dimengerti kepada yang memberi wewenang dan menerima wewenang dilapangan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan TUPOKSI.

Maleong, Lexi J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Gramedia

Safi'i, H. M. 2007. *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang: Averroes Pre

Subarsono, A. G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

DEPDIKNAS. 2004. *Acuan Menu Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generic)*. Jakarta: DEPDIKNAS



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RAMLI
NIM / Periode lulus : E21110034
Fakultas/ Jurusan : Fisip / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : *Flash09.ram@gmail.com*

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PublikA *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

**KUALIFIKASI STANDAR PENDIDIKAN DALAM PERMENDIKNAS NO 58 TAHUN
2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI
KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Mei 2016
Mahasiswa,


RAMLI
NIM. E21110034

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)